



Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Laporan Ekonomi Bulanan

Januari 2008

Sekretariat Kamar Dagang dan Industri Indonesia
oleh
Erna Zetha Rusman

Menara Kadin Indonesia 29th Floor
JI. HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Kuningan – Jakarta Selatan
www.kadin-indonesia.or.id

Indikator Ekonomi

Indikator	2003	2004	2005	2006	2007
1. Nilai PDB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp Triliun)	1,579.6	1,660.6	1,749.6	1,847.3	1964.0
2. Pertumbuhan PDB (%)	4.88	5.13	5.6	5.5	6.32
3. Inflasi (%)	5.06	6.4	17.1	6.6	6.59
4. Total Ekspor (US\$ Milyar)	55.6	69.7	85.6	100.7	113.9
5. Ekspor Nonmigas (US\$ Milyar)	43.1	54.1	66.3	79.5	91.94
6. Total Impor (US\$ Milyar)	29.5	46.2	57.6	61.1	74.40
7. Impor Nonmigas (US\$ Milyar)	22.6	34.6	40.2	42.1	52.52
8. Neraca Perdagangan (US\$ Milyar)	26.1	23.5	28.0	39.6	39.59
9. Neraca Transaksi Berjalan (US\$ Milyar)	4.0	2.9	0.9	9.6	11.36
10. Cadangan Devisa (US\$ Milyar, akhir tahun)	36.3	35.9	34.7	43.3	56.92
11. Posisi Utang Luar Negeri (US\$ Milyar)	135.4	137.0	130.7	128.7	131.3 (1)
12. Rupiah/US\$ (Kurs Tengah Bank Indonesia)	8,330	9,355	9,830.0	9,020.0	9.386
13. Total Penerimaan Pemerintah (Rp Triliun)	341.1	380.4	516.2	659.1	723.06 *)
14. Total Pengeluaran Pemerintah (Rp Triliun)	378.8	397.8	542.4	699.1	763.57 *)
15. Defisit Anggaran (Rp Triliun)	-37.7	-17.4	-26.2	-40.0	-40.51 *)
16. Uang Primer (Rp Triliun)	136.5	199.7	239.8	297.1	379.6
17. Uang Beredar (Rp Triliun)					
a. Arti Sempit (M1)	207.6	253.8	281.9	361.1	460.8
b. Arti Luas (M2)	911.2	1,033.5	1,203.2	1,382.1	1,888.1
18. Dana Pihak Ketiga Perbankan (Rp Triliun)	866.3	965.1	1,134.1	1,298.8	1,528.2
19. Kredit Perbankan (Rp Triliun)	411.7	553.6	689.7	787.1	995.1
20. Suku Bunga (persen per tahun)					
a. SBI 1 Bulan	8.06	7.40	12.75	9.75	8.00
b. Deposito 1 Bulan	7.67	6.40	11.98	8.96	7.19
c. Kredit Modal Kerja	15.77	13.40	15.92	15.07	13.00
d. Kredit Investasi	16.27	14.10	15.43	15.10	13.01
21. Persetujuan Investasi					
- Domestik (Rp Triliun)	16.0	36.8	50.6	162.8	188.88
- Asing (US\$ Billion)	6.2	10.3	13.6	15.7	40.15
22. IHSG BEJ	742.5	1,000.2	1,162.6	1,805.5	2,745.83
23. Nilai Kapitalisasi Pasar BEJ (Rp Triliun)	411.7	679.9	801.2	1,249.1	1,988.3

Sumber: BPS, BI, dan BEJ

1) Posisi Akhir Maret 2007

*) Dalam APBN 2007



Perkembangan Ekonomi Indonesia

Oleh Sekretariat KADIN Indonesia

Januari 2008

Setelah mencatatkan kinerja perekonomian yang cukup baik selama tahun 2007, dewasa ini Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik, yang jika tidak diantisipasi secara baik akan membawa dampak yang serius pada perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Dari sisi inflasi, permasalahan tidak saja terkait dengan melonjaknya harga minyak dunia yang sampai menyentuh posisi US\$ 102 per barrel, tetapi juga berkaitan dengan kenaikan harga komoditi pangan yang diperkirakan masih akan terus berlanjut akibat berkurangnya *supply* dunia dan rendahnya produksi berbagai komoditi pangan tersebut. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rusaknya berbagai infrastruktur (khususnya jalan raya), baik akibat bencana alam maupun akibat kurangnya pemeliharaan, yang berakibat pada terhambatnya arus barang dalam negeri.

Sementara itu dari sisi kegiatan ekonomi, permasalahan tidak semata-mata berkaitan dengan dampak krisis keuangan Amerika Serikat yang diperkirakan akan menurunkan perdagangan internasional, tetapi terlebih-lebih pada belum terlihatnya peningkatan investasi yang memadai bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi secara optimal. Bahkan minat investasi di sektor riil dikhawatirkan semakin menurun sejalan dengan bermunculannya berbagai kondisi domestik yang kontraproduktif. Terjadinya kelangkaan listrik, keterbatasan dana, mahal dan langkanya bahan baku tidak lagi sekedar menghambat perluasan produksi, tetapi juga telah mengancam terhentinya kegiatan produksi pada banyak usaha rakyat. Kebijakan fiskal yang diharapkan bisa menjadi motor dan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, nampaknya juga akan menghadapi persoalan sendiri dengan naiknya harga minyak dunia dan adanya Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan Pokok atas beras, kedelai, gandum, dan minyak goreng. Belum lagi dengan beban hutang yang semakin meningkat.

Beratnya beban perekonomian pada tahun-tahun belakangan ini tidak saja menjadikan kebijakan fiskal sebagai tumpuan solusi bagi berbagai macam persoalan, tetapi sekaligus sebagai pihak yang sering dikorbankan. Ironinya, dalam berbagai keterbatasannya kebijakan fiskal juga harus menanggung setiap permasalahan, termasuk menanggung bencana lumpur Lapindo yang sedianya menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas. Beban fiskal juga semakin berat dengan terus bergulirnya pemekaran daerah di berbagai propinsi, yang selayaknya bisa dibatasi dengan kemauan politik pemerintah. Dalam kondisi yang berlangsung dewasa ini, kebijakan fiskal nampaknya tidak lagi bisa dilihat sebagai alat untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru telah menjadi beban ekonomi masyarakat.

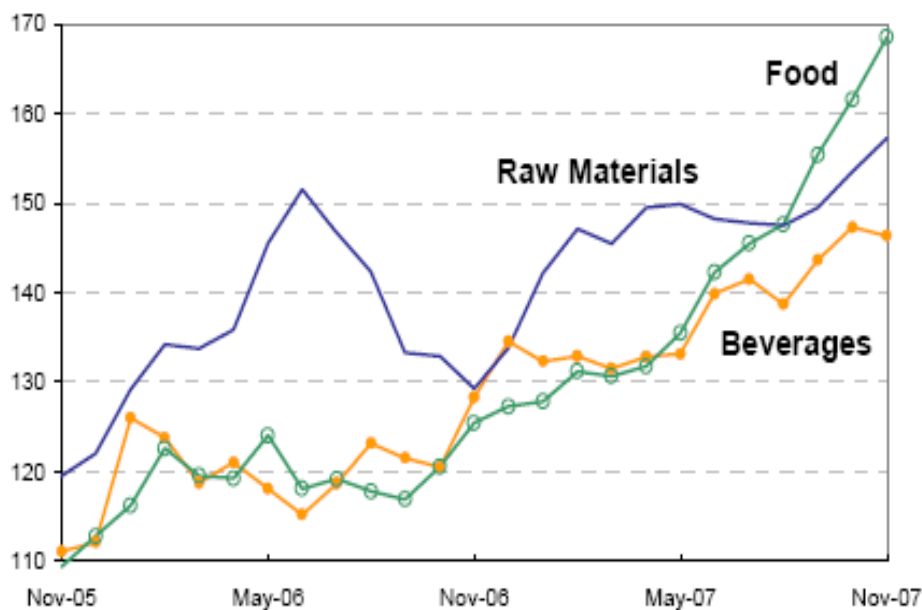
Berdalih penghematan, pemerintah akan melakukan pemotongan anggaran pada berbagai Departemen, termasuk Departemen Pendidikan yang dampaknya akan ditanggung oleh masyarakat berupa mahalnya biaya pendidikan. Defisit anggaran dipastikan akan dibebankan ke masyarakat dalam bentuk peningkatan pajak dan/atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang sepertinya akan sulit dihindari jika harga minyak terus meroket. Padahal kelemahan manajemen fiskal yang sudah berlangsung sepanjang tahun 2006-2007 telah menjadikan kebijakan fiskal jauh dari sasaran dan rawan penyalahgunaan. Kelemahan manajemen fiskal telah menyebabkan terjadinya penumpukan anggaran sampai 40 persen pada akhir tahun anggaran. Akibatnya, kebijakan ini tidak saja gagal menjadi stimulus pertumbuhan, tetapi juga gagal menjalankan fungsi distribusinya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Tingkat Inflasi

Seperti telah diprediksi sebelumnya, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2007 tidak akan berhenti melaju, meskipun hari raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru sudah terlewati. Kenaikan harga berbagai komoditi pangan sejak bulan Juli 2007, yang terus berlanjut sampai saat ini, jelas bukan merupakan kenaikan harga musiman yang seperti selama ini terjadi. Kenaikan harga yang berlangsung sejak awal semester kedua tahun 2007 lalu merupakan kenaikan struktural yang dipacu oleh kenaikan harga komoditi pangan dunia, yang sudah berlangsung sejak akhir triwulan pertama tahun 2007. Kenaikan harga komoditi pangan dunia dan kenaikan minyak mentah yang terjadi secara bersamaan merupakan biang keladi meningkatnya inflasi pada banyak negara di dunia, termasuk di China, Vietnam, dan negara-negara Eropa. Kenaikan indeks harga pangan dunia yang terjadi saat ini merupakan yang terbesar sejak tahun 1845. Dan secara riil kenaikan harga komoditi pangan dunia mencapai 75 persen sejak tahun 2005.

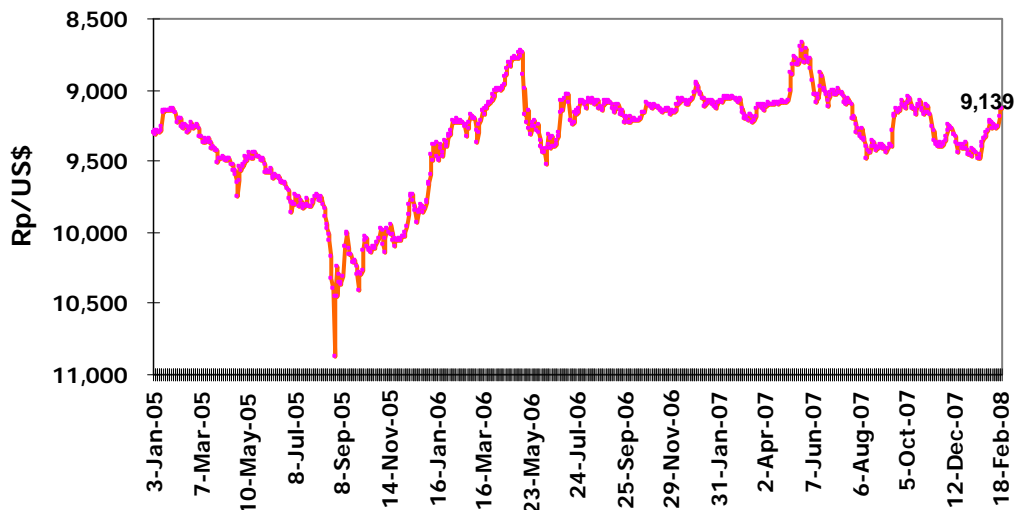
Indeks Harga Komoditi Penting

Indeks Harga Nominal US\$ (1990=100)



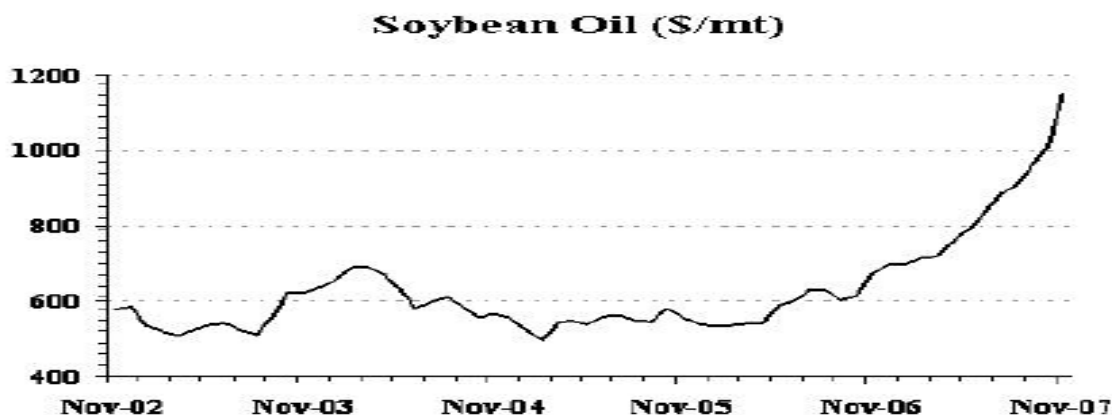
Kendati kenaikan harga pangan disebabkan melonjaknya harga pangan dunia, namun hal tersebut bukan merupakan satu-satunya faktor yang mendorong kenaikan inflasi di Indonesia. Kenaikan harga komoditi pangan dunia tidak akan terlalu menjadi ancaman jika produksi dalam negeri dapat terjaga pada tingkatan yang memadai. Akibat semakin terpuruknya produksi bahan makanan nasional, dewasa ini Indonesia sudah semakin tergantung pada bahan pangan impor, yang dampaknya bermuara pada sering terjadinya kelangkaan pasokan di dalam negeri. Kebijakan *ad hoc* melalui Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan Pokok (PKSHPP) dan kemudahan impor (termasuk penghapusan SNI pada terigu impor) dipastikan bukan jalan keluar yang bisa mengatasi persoalan, karena terjadinya kelangkaan produksi komoditi pangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini mengimpor komoditi yang sedang mengalami kenaikan harga sama halnya dengan mengimpor angka inflasi ke Indonesia. Lebih-lebih jika stabilitas nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan. Meskipun sempat melemah pada bulan Januari lalu, untungnya kurs rupiah dapat dijaga pada level yang cukup aman. Sungguhpun demikian, kenaikan harga pada kelompok bahan makanan yang mencapai 2,77 persen telah menyebabkan tingkat inflasi bulan Januari 2008 mencapai angka 1,77 persen, yang merupakan angka inflasi bulan Januari tertinggi sejak tahun 2003.

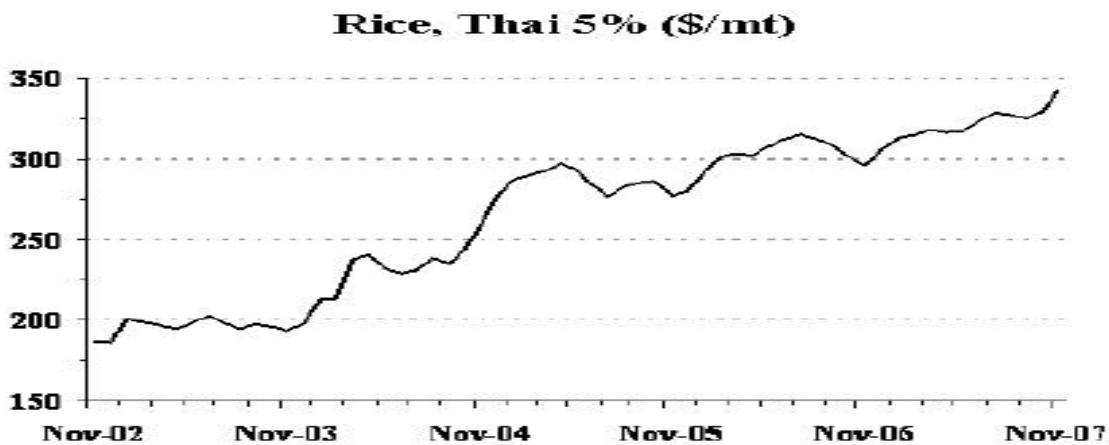
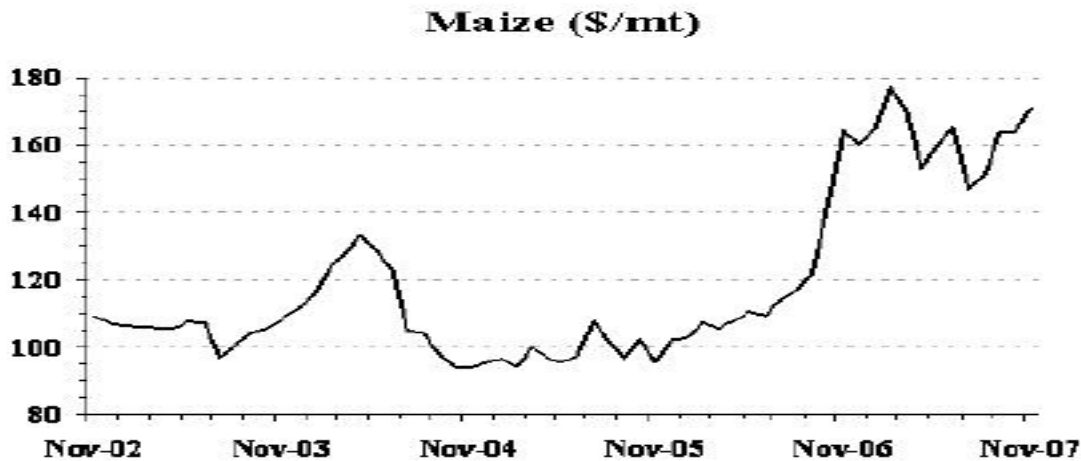
**Kurs Tengah Rupiah terhadap Dollar AS
Januari 2005 - 18 Februari 2008**



Sementara itu kenaikan harga beras di pasar dunia antara lain disebabkan karena China dan Vietnam mulai menahan diri untuk tidak mengekspor komoditi ini ke pasar dunia. Kenaikan harga jagung dan gula disebabkan kenaikan permintaan dunia untuk kebutuhan bio-etanol, terutama di Amerika Serikat dan Brazil. Akibatnya sektor peternakan telah menanggung beban berat akibat semakin tergantungnya Indonesia pada keberadaan jagung impor. Sementara itu kenaikan harga kedelai dunia yang disebabkan penurunan produksi di Amerika Serikat dan Argentina telah melonjakkan harga kedelai dan menyengsarakan produsen tahu dan tempe dalam negeri. Sebagai sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi masyarakat, kenaikan harga kedelai bukan sesuatu hal yang pantas untuk tidak disikapi secara serius. Program peningkatan produksi kedelai dalam negeri selayaknya harus menjadi program nasional yang direncanakan secara matang dan berkesinambungan. Apabila produksi dalam negeri tidak mampu mengikuti irama kenaikan harga dunia, khususnya harga pangan pokok, maka peningkatan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat merupakan ancaman yang nyata pada tahun-tahun mendatang.

Kenaikan Harga Beberapa Komoditas Pangan





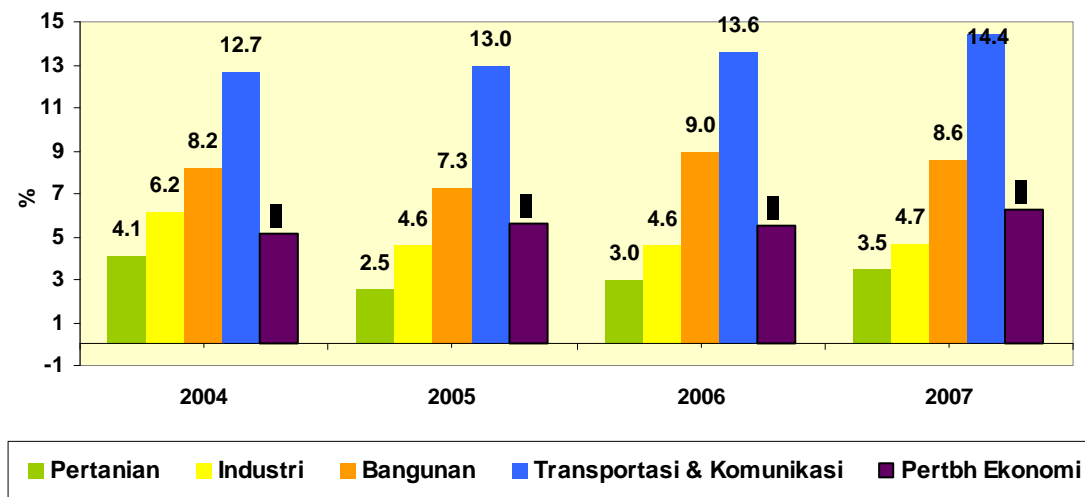
Pertumbuhan Ekonomi

Selain ancaman inflasi, Indonesia diperkirakan juga akan mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran yang sudah semakin memprihatinkan. Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2008 ini diperkirakan bisa lebih buruk dibanding perkiraan pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan maksimal akan berada di sekitar 6,2 persen, bahkan bukan tidak mungkin melorot ke angka di bawah 6 persen jika pemerintah juga gagal menjaga stabilitas nilai tukar. Perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia akibat krisis ekonomi di Amerika Serikat, diperkirakan akan menjadi faktor penyebab yang penting, mengingat besarnya peranan ekspor pada pertumbuhan ekonomi nasional akhir-akhir ini.

Namun yang tidak kalah penting adalah akibat dari semakin buruknya infrastruktur dalam negeri dewasa ini. Buruknya sarana infrastruktur jalan raya, pelabuhan, dan terbatasnya pasokan energi dan listrik akan menjadi penghambat yang sangat berpengaruh pada kelancaran kegiatan sektor produksi riil. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengakui kelemahan pemerintah dalam mengelola kelistrikan, dan mengatakan bawa krisis akan berlangsung sampai tahun 2009, jelas akan berdampak besar pada minat investasi di sektor produksi riil. Apalagi persoalan kenaikan harga minyak dunia, yang juga belum jelas cara mengatasinya, telah menjadi suatu hambatan yang nyata bagi keberlanjutan sektor industri.

Melihat begitu banyak persoalan yang menghadang pada tahun 2008 ini, selayaknya pemerintah tidak sekedar berwacana dengan kebijakan-kebijakannya. Implementasi kebijakan sampai saat ini baru yang bersifat *ad hoc*, sementara kebijakan-kebijakan mendasar belum diimplementasikan sebagaimana mestinya. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya kekosongan yang menjembatani antara lahirnya kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Program revitalisasi pertanian terlihat hanya sekedar wacana di masa kampanye Presiden, karena kenyataannya tidak ada gerakan faktual di lapangan yang menunjukkan bahwa program tersebut betul-betul dijalankan. Kondisi sektor pertanian dapat dikatakan tidak mengalami perbaikan yang berarti, karena pada tahun 2007 lalu hanya tumbuh sekitar 3,5 persen yang tidak lebih baik dari pertumbuhannya pada tahun 2004 yang mencapai 4,5 persen. Dan yang paling memprihatinkan, dewasa ini Indonesia justru menghadapi krisis pangan akibat tidak berkembangnya produksi tanaman pangan nasional dan meningkatnya harga pangan dunia.

Pertumbuhan Ekonomi dan Beberapa Sektor (%)

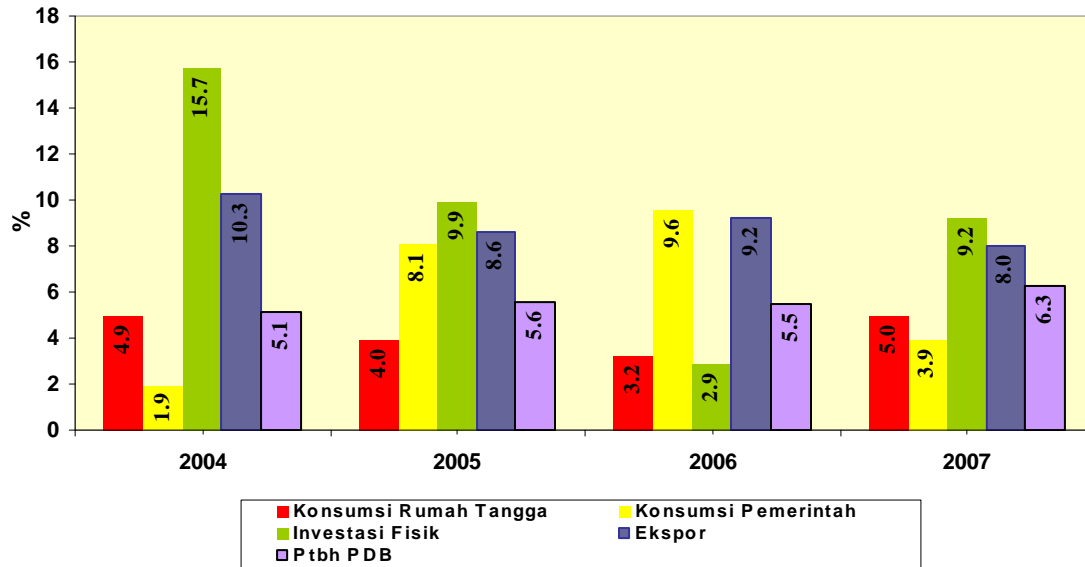


Sementara itu sektor industri manufaktur, yang pernah menjadi motor pertumbuhan ekonomi, sampai dewasa ini belum menunjukkan kebangkitannya kembali. Sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998, kebijakan di sektor ini semakin jauh dari arah yang jelas. Ketidak-jelasan visi dan misi sektor industri menyebabkan sektor ini semakin jauh dari perkembangan yang memadai. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhan sektor industri tidak lagi pernah melebihi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, seperti yang dicapai di masa sebelum krisis tahun 1997. Kenaikan harga minyak bumi dan energi memang berdampak langsung kepada sektor industri manufaktur, karena meningkatnya biaya produksi sektor ini. Namun yang juga berperan penting terhadap terjadinya de-industrialisasi di Indonesia adalah karena ketidakjelasan strategi dan kebijakan industri. Proses de-industrialisasi ini merupakan penyebab utama dari semakin berkurangnya daya serap tenaga kerja di sektor industri manufaktur.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam negeri patut dihargai, namun hal tersebut baru sebatas kebijakan-kebijakan yang lebih reaktif ketimbang antisipatif. Target-target yang diumumkan seringkali tidak realistis, sehingga kerap kali dikoreksi dalam waktu yang sangat singkat dan membuat kredibilitas pemerintah merosot di mata dunia usaha. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kenaikan tingkat investasi masih jauh dari memadai. Peningkatan investasi kebanyakan ditujukan pada sektor konstruksi atau properti ketimbang sebagai penanaman modal usaha di sektor riil. Hal ini tidak saja berkaitan dengan keinginan menghindari risiko kegagalan, tetapi juga karena tidak didukung oleh berbagai prasarana yang dibutuhkan oleh suatu proses produksi. Dua kali *infrastructure summit*, berbagai kebijakan ekonomi, dan Inpres No.6/2007 tentang percepatan pembangunan infrastruktur sampai saat ini belum menunjukkan hasilnya. Kesemua program tersebut lebih merupakan respon birokratik administratif ketimbang upaya konkrit untuk menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur. Kelambanan pemerintah dan ketidakmampuan melakukan langkah-langkah terobosan menyebabkan pembangunan infrastruktur sangat terbengkalai. Jangankan untuk mencapai target-target yang ditetapkan, bahkan untuk memelihara dan menjaga infrastruktur yang sudah adapun pemerintah tidak mampu.

Relatif masih rendahnya kenaikan investasi dalam negeri ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi fisik) yang baru sebesar 9,2 persen selama tahun 2007. Sehingga sebagai sumber pertumbuhan, komponen investasi hanya menyumbang 2 persen untuk total pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,3 persen. Sedangkan sebagai sumber pertumbuhan utama selama tahun 2007 lalu diberikan oleh komponen ekspor sebesar 3,8 persen dan kemudian komponen konsumsi rumah tangga sebesar 2,9 persen.

Pertumbuhan PDB Menurut Penggunaan (%)



This report is for use by professional and business investors only and has been prepared for information purposes and is not an offer to sell or a solicitation to buy any institution. The information herein was obtained or derived from sources that we believe are reliable, but whilst all reasonable care has been taken to ensure that stated facts are accurate and opinions fair and reasonable, we do not represent that it is accurate or complete and it should not be relied upon as such. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice. This document is for the information of clients only and must not be copied, reproduced or made available to others.